



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.031.966.581.000,- bertambah sejumlah Rp.58.687.142.000,- sehingga menjadi Rp.1.090.653.723.000,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 911.966.581.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 44.278.342.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 956.244.923.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.031.966.581.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 58.687.142.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.090.653.723.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (134.408.800.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 120.000.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.408.800.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 134.408.800.000,-

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah	Rp.		0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	134.408.800.000,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,-

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 222.478.414.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 19.925.882.000,-
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 242.404.296.000,-
  - b. Dana perimbangan
    - 1) Semula Rp. 590.290.453.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 321.051.000,-
    - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 590.611.504.000,-
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 99.197.714.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 24.031.409.000,-
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 123.229.123.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 32.500.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 2.500.000.000,-
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 35.000.000.000,-
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 5.001.088.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 289.447.000,-
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.290.535.000,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 9.982.607.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 0,-
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 9.982.607.000,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 174.994.719.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 17.136.435.000,-
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 192.131.154.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp.	24.412.946.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>321.051.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		24.733.997.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	455.177.029.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		455.177.029.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	110.700.478.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		110.700.478.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	16.757.600.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(433.600.000,-)</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.		16.324.000.000,-
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	40.043.975.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.230.009.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		55.273.984.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	42.396.139.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		42.396.139.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.235.000.000,-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		9.235.000.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	333.615.691.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.038.358.000,-)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		332.577.333.000,-

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	698.350.890.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>59.725.500.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		758.076.390.000,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	307.867.090.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.053.038.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		314.920.128.000,-
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	16.490.370.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.910.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		11.580.370.000,-
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	5.092.290.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(930.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		4.162.290.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,-
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	560.703.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.497.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		563.200.000,-
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	3.605.238.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.253.893.000,-)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.351.345.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	65.633.709.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(751.525.000,-)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		64.882.184.000,-

b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	387.924.261.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>16.886.126.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		404.810.387.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	244.792.920.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>43.590.899.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		288.383.819.000,-

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	120.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.408.800.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		134.408.800.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	120.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.408.800.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		134.408.800.000,-
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,-

f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.		0,-
h. Penerimaan hasil penarikan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan	Rp.		0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b			terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
e. Pemberian dana bergulir			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pemberian dana bergulir setelah Perubahan	Rp.		0,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 13 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 13 Agustus 2019

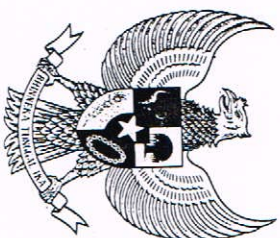
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(2-241/2019)



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

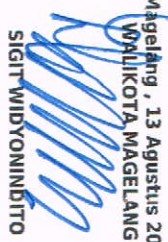
**RINGKASAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**







PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

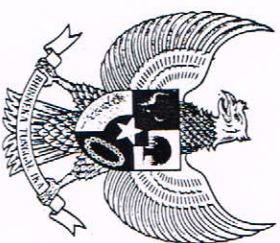
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH / BERKURANG	Rp	%
		3	4	5			
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>222.478.414.000,00</b>	<b>242.404.296.000,00</b>	<b>19.925.882.000,00</b>	<b>8,96</b>		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	35.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7,69		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.001.088.000,00	5.290.535.000,00	289.447.000,00	5,79		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.982.607.000,00	0,00	0,00		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.994.719.000,00	192.131.154.000,00	17.136.435.000,00	9,79		
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>590.290.453.000,00</b>	<b>590.611.504.000,00</b>	<b>321.051.000,00</b>	<b>0,05</b>		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	24.733.997.000,00	321.051.000,00	1,32		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	110.700.478.000,00	0,00	0,00		
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99.197.714.000,00</b>	<b>123.229.123.000,00</b>	<b>24.031.409.000,00</b>	<b>24,23</b>		
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	16.324.000.000,00	(433.600.000,00)	(2,59)		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.031.966.581.000,00</b>	<b>1.090.653.723.000,00</b>	<b>58.687.142.000,00</b>	<b>5,69</b>		
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>333.615.691.000,00</b>	<b>332.577.333.000,00</b>	<b>(1.038.358.000,00)</b>	<b>(0,31)</b>		
2.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090.000,00	314.920.128.000,00	7.053.038.000,00	2,29		
2.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	11.580.370.000,00	(4.910.000.000,00)	(29,77)		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	4.162.290.000,00	(930.000.000,00)	(18,26)		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	563.200.000,00	2.497.000,00	0,45		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.351.345.000,00	(2.253.893.000,00)	(62,52)		
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>698.350.890.000,00</b>	<b>758.076.390.000,00</b>	<b>59.725.500.000,00</b>	<b>8,55</b>		
2.2.1	Belanja Pegawai	65.633.709.000,00	64.882.184.000,00	(751.525.000,00)	(1,15)		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.924.261.000,00	404.810.387.000,00	16.886.126.000,00	4,35		
2.2.3	Belanja Modal	244.792.920.000,00	288.383.819.000,00	43.590.899.000,00	17,81		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(120.000.000.000,00)</b>	<b>(134.408.800.000,00)</b>	<b>(14.408.800.000,00)</b>	<b>12,01</b>		
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>134.408.800.000,00</b>	<b>14.408.800.000,00</b>	<b>12,01</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>134.408.800.000,00</b>	<b>14.408.800.000,00</b>	<b>12,01</b>		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1		3	4	5	6
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Magelang, 13 Agustus 2019  
 WALIKOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BARAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

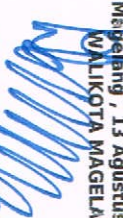
**RINGKASAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**








**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

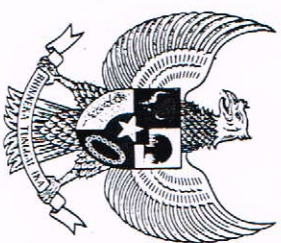
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA						BENTAMBAH/ BERKURANG												
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH /BERKURANG		TIDAK LANGSUNG		LANGSUNG		JUALAH BELANJA		TIDAK LANGSUNG		LANGSUNG		JUALAH BELANJA		Rp	%					
		Rp	3	Rp	4	Rp	5	%	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp			12	Rp	13	%	14
1	1	167.882.378.000,00	183.620.006.000,00	15.737.628.000,00	9,37	184.705.247.000,00	447.143.037.000,00	631.848.284.000,00	191.377.171.000,00	493.802.467.000,00	685.179.638.000,00	53.331.354.000,00	8,44													
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820.636.000,00	49.865.546.000,00	166.686.182.000,00	122.447.295.000,00	52.508.023.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96													
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820.636.000,00	49.060.535.000,00	165.881.171.000,00	122.447.295.000,00	51.715.409.000,00	174.162.704.000,00	8.281.553.000,00	4,99													
1.01.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.549.000,00	515.549.000,00	0,00	505.990.000,00	505.990.000,00	(10.559.000,00)	(2,04)													
1.01.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.331.000,00	83.331.000,00	0,00	81.493.000,00	81.493.000,00	(1.838.000,00)	(2,21)													
1.01.4.01.05	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767.000,00	117.767.000,00	0,00	117.767.000,00	117.767.000,00	0,00	0,00													
1.01.4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.364.000,00	87.364.000,00	0,00	87.364.000,00	87.364.000,00	0,00	0,00													
1.02	Kesehatan	166.492.578.000,00	182.230.206.000,00	15.737.628.000,00	9,45	50.605.119.000,00	273.250.524.000,00	323.855.643.000,00	51.959.451.000,00	307.440.303.000,00	359.399.844.000,00	35.544.201.000,00	10,98													
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	11.492.578.000,00	12.230.206.000,00	737.628.000,00	6,42	25.436.819.000,00	46.430.693.000,00	71.867.512.000,00	25.503.154.000,00	48.992.682.000,00	74.496.036.000,00	2.628.524.000,00	3,66													
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	135.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	25.168.300.000,00	225.800.207.000,00	230.969.507.000,00	26.456.297.000,00	257.428.207.000,00	283.884.504.000,00	32.915.957.000,00	13,12													
1.02.2.07.01	Dinas Pembudayaan Masyarakat, Perencanaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.546.000,00	212.546.000,00	0,00	212.546.000,00	212.546.000,00	0,00	0,00													
1.02.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	0,00													
1.02.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.818.000,00	277.818.000,00	0,00	277.818.000,00	277.818.000,00	0,00	0,00													
1.02.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.767.000,00	301.767.000,00	0,00	299.667.000,00	299.667.000,00	(1.900.000,00)	(0,63)													

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA						
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH /BERKURANG		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.04	Keuangan	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	(14.408.800.000,00)	12,01	0,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000.000,00	14.408.800.000,00	12,01		
4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	(14.408.800.000,00)	12,01	0,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000.000,00	14.408.800.000,00	12,01		
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN (SILPA)													0,00	0,00

Mepeyang, 13 Agustus 2019  
**WALIKOTA MAGELANG**  
  
**SIGIT WIDYONINDITO**

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. K.C. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG / KA SUB BID	



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**RINCIAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**




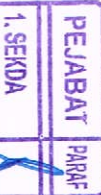


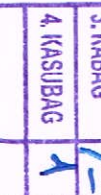
**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**







Ususan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan  
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

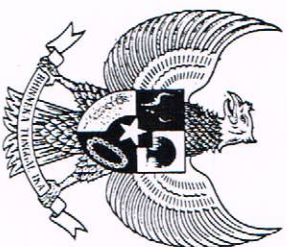
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5	BELANJA	169.284.703.000,00	177.586.808.000,00	8.302.105.000,00	4,90	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	52.464.067.000,00	55.139.513.000,00	2.675.446.000,00	5,10	
101.10101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.212.872.000,00	2.258.036.000,00	45.164.000,00	2,04	
101.10101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	827.548.000,00	827.548.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	778.200.000,00	778.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	49.348.000,00	49.348.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	
101.10101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	
101.10101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	
101.10101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>407.40701.19.009</b>	<b>Fasilitasi keperawatan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi</b>	<b>72.920.000,00</b>	<b>87.870.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>20,50</b>	
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	76.370.000,00	14.950.000,00	24,34	
<b>407.40701.19.014</b>	<b>Fasilitasi pusat Inovasi Kota Magelang</b>	<b>71.536.000,00</b>	<b>74.441.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>4,06</b>	
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	58.091.000,00	2.905.000,00	5,26	
<b>407.40701.19.016</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional</b>	<b>41.800.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>(1.900.000,00)</b>	<b>(4,55)</b>	
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.745.187.000,00)</b>	<b>(4.656.188.000,00)</b>	<b>88.999.000,00</b>	<b>(1,88)</b>	

Magelang, 13 Agustus 2019  
 WAKIL KOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. N/2 BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG	
KA. SUB BID	



**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		PEGAWAI	JENIS BELANJA BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	28.544.469.000,00	232.078.266.000,00	186.520.302.000,00	447.143.037.000,00	28.387.625.000,00	247.619.235.000,00	217.795.607.000,00	493.802.467.000,00	46.659.430.000,00	10,44		
1.01.01	Pendidikan	3.072.007.000,00	41.293.513.000,00	5.500.026.000,00	49.865.546.000,00	2.892.567.000,00	42.797.544.000,00	6.817.912.000,00	52.508.023.000,00	2.642.477.000,00	5,30		
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.010.057.000,00	40.550.452.000,00	5.500.026.000,00	49.060.535.000,00	2.830.617.000,00	42.066.880.000,00	6.817.912.000,00	51.715.409.000,00	2.654.874.000,00	5,41		
1.01.1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.010.057.000,00	40.550.452.000,00	5.500.026.000,00	49.060.535.000,00	2.830.617.000,00	42.066.880.000,00	6.817.912.000,00	51.715.409.000,00	2.654.874.000,00	5,41		
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.950.000,00	1.431.922.000,00	0,00	2.212.872.000,00	780.950.000,00	1.477.086.000,00	0,00	2.258.036.000,00	45.164.000,00	2,04		
1.01.1.01.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	223.480.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan di atas/operasional	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	778.200.000,00	49.348.000,00	0,00	827.548.000,00	778.200.000,00	49.348.000,00	0,00	827.548.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	187.946.000,00	0,00	187.946.000,00	0,00	201.662.000,00	0,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30		
1.01.1.01.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	50.651.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	77.775.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	10.321.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	289.050.000,00	0,00	289.050.000,00	0,00	319.850.000,00	0,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66		
1.01.1.01.01.01.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/ tidak tetap	0,00	319.392.000,00	0,00	319.392.000,00	0,00	301.016.000,00	0,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)		
1.01.1.01.01.01.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	2.750.000,00	37.241.000,00	0,00	39.991.000,00	2.750.000,00	56.265.000,00	0,00	59.015.000,00	19.024.000,00	47,57		
1.01.1.01.01.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.000.000,00	742.390.000,00	0,00	743.390.000,00	1.000.000,00	594.464.000,00	266.521.000,00	861.985.000,00	118.595.000,00	15,95		
1.01.1.01.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00		
1.01.1.01.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100,00		
1.01.1.01.01.01.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.000.000,00	100.705.000,00	0,00	101.705.000,00	1.000.000,00	57.779.000,00	0,00	58.779.000,00	(42.926.000,00)	(42,21)		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	Rp	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4.07.4.07.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.18.001	Pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	121.050.000,00	438.538.000,00	0,00	559.588.000,00	120.150.000,00	459.538.000,00	0,00	579.688.000,00	20.100.000,00	3,59			
4.07.4.07.01.01.19.001	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000,00	51.467.000,00	0,00	70.467.000,00	14.100.000,00	56.912.000,00	0,00	71.012.000,00	545.000,00	0,77			
4.07.4.07.01.01.19.003	Pembelajaran Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	43.600.000,00	41.245.000,00	0,00	84.845.000,00	43.600.000,00	44.845.000,00	0,00	88.445.000,00	3.600.000,00	4,24			
4.07.4.07.01.01.19.005	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.01.19.009	Facilitasi Keperguruan dalam Anugrah Idek dan Inovasi	11.500.000,00	61.420.000,00	0,00	72.920.000,00	11.500.000,00	76.370.000,00	0,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50			
4.07.4.07.01.01.19.014	Facilitasi pusat inovasi Kota Magelang	16.350.000,00	55.186.000,00	0,00	71.536.000,00	16.350.000,00	58.091.000,00	0,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06			
4.07.4.07.01.01.19.016	Facilitasi kegiatan seminar Nasional/internasional	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)			

Magelang, 13 Agustus 2019  
 MALIKOTA MAGELANG  
 SIGITWIDYONINDITO

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. ASISTEN		
3. KABAG		
4. KASUBAG		

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
2. KP. BADAN		
3. SEKRETANIS		
4. KA. BID		
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID		



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN  
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI  
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PERMINTAH KOTA MAGELANG**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		3	4	5	6		
<b>1</b>							
<b>01</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>227.914.082.000,00</b>	<b>224.630.666.000,00</b>	<b>(3.283.416.000,00)</b>	<b>(1,44)</b>		
01.2.03	Pangan	559.210.000,00	565.520.000,00	6.310.000,00	1,13		
01.2.10	Komunikasi dan Informatika	18.874.495.000,00	18.837.403.000,00	(37.092.000,00)	(0,20)		
01.2.14	Statistik	614.207.000,00	616.126.000,00	1.919.000,00	0,31		
01.2.15	Persandian	142.144.000,00	145.185.000,00	3.041.000,00	2,14		
01.2.18	Kearsipan	1.463.404.000,00	1.506.994.000,00	43.590.000,00	2,98		
01.4.01	Administrasi Pemerintahan	99.716.343.000,00	103.333.441.000,00	3.617.098.000,00	3,63		
01.4.02	Pengawasan	15.324.126.000,00	15.816.106.000,00	491.980.000,00	3,21		
01.4.03	Perencanaan	12.378.494.000,00	12.916.880.000,00	538.386.000,00	4,35		
01.4.04	Keuangan	52.012.609.000,00	44.001.356.000,00	(8.011.253.000,00)	(15,40)		
01.4.05	Kepegawaian	18.651.314.000,00	18.641.493.000,00	(9.821.000,00)	(0,05)		
01.4.06	Pendidikan dan Pelatihan	3.444.549.000,00	3.605.974.000,00	161.425.000,00	4,69		
01.4.07	Penelitian dan Pengembangan	4.733.187.000,00	4.644.188.000,00	(88.999.000,00)	(1,88)		
<b>03</b>	<b>Keterlibatan dan Keamanan</b>	<b>22.403.526.000,00</b>	<b>22.560.094.000,00</b>	<b>156.568.000,00</b>	<b>0,70</b>		
03.1.05	Kelentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.403.526.000,00	22.560.094.000,00	156.568.000,00	0,70		
<b>04</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>79.243.304.000,00</b>	<b>80.302.563.000,00</b>	<b>1.059.259.000,00</b>	<b>1,34</b>		
04.2.01	Tenaga Kerja	8.431.203.000,00	8.358.158.000,00	(73.045.000,00)	(0,87)		
04.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.574.680.000,00	7.255.697.000,00	681.017.000,00	10,36		
04.2.09	Perhubungan	10.480.599.000,00	10.440.533.000,00	(40.066.000,00)	(0,38)		
04.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.225.537.000,00	1.257.096.000,00	31.559.000,00	2,58		
04.2.12	Penanaman Modal	5.093.974.000,00	5.165.585.000,00	71.611.000,00	1,41		
04.3.01	Kelautan dan Perikanan	654.505.000,00	673.443.000,00	18.938.000,00	2,89		
04.3.03	Pertanian	10.207.447.000,00	10.874.241.000,00	666.794.000,00	6,53		
04.3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	7.296.778.000,00	7.595.439.000,00	298.661.000,00	4,09		
04.3.06	Perdagangan	12.912.032.000,00	12.249.390.000,00	(662.642.000,00)	(5,13)		
04.3.07	Perindustrian	16.229.458.000,00	16.297.366.000,00	67.908.000,00	0,42		
04.3.08	Transmigrasi	137.091.000,00	135.615.000,00	(1.476.000,00)	(1,08)		
<b>05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>52.105.499.000,00</b>	<b>59.736.110.000,00</b>	<b>7.630.611.000,00</b>	<b>14,64</b>		
05.2.04	Pertanian	7.702.628.000,00	6.879.828.000,00	(822.800.000,00)	(10,66)		
05.2.05	Lingkungan Hidup	44.402.871.000,00	52.856.282.000,00	8.453.411.000,00	19,04		
<b>06</b>	<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>	<b>112.270.574.000,00</b>	<b>121.512.423.000,00</b>	<b>9.241.849.000,00</b>	<b>8,23</b>		
06.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.365.456.000,00	102.667.256.000,00	6.301.800.000,00	6,54		
06.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.905.118.000,00	18.845.167.000,00	2.940.049.000,00	18,48		
<b>07</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>325.277.811.000,00</b>	<b>360.804.012.000,00</b>	<b>35.526.201.000,00</b>	<b>10,92</b>		
07.1.02	Kesehatan	323.855.643.000,00	359.399.844.000,00	35.544.201.000,00	10,98		

KODE	URAIAN	3	4	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				5	6
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
07.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.422.168.000,00	1.404.168.000,00	(18.000.000,00)	(1,27)
<b>08</b>	<b>Partisipasi dan Budaya</b>	<b>8.944.593.000,00</b>	<b>8.873.718.000,00</b>	<b>(70.875.000,00)</b>	<b>(0,79)</b>
08.2.16	Kebudayaan	3.912.748.000,00	3.928.929.000,00	16.181.000,00	0,41
08.3.02	Partisipasi	5.031.845.000,00	4.944.789.000,00	(87.056.000,00)	(1,73)
<b>10</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>189.737.277.000,00</b>	<b>198.085.800.000,00</b>	<b>8.348.523.000,00</b>	<b>4,40</b>
10.1.01	Pendidikan	166.686.182.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96
10.2.13	Keperguruan dan Olah Raga	16.559.857.000,00	16.661.224.000,00	101.367.000,00	0,61
10.2.17	Perpustakaan	6.491.238.000,00	6.469.258.000,00	(21.980.000,00)	(0,34)
<b>11</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>14.069.915.000,00</b>	<b>14.148.337.000,00</b>	<b>78.422.000,00</b>	<b>0,56</b>
11.1.06	Sosial	6.632.359.000,00	6.751.959.000,00	119.600.000,00	1,80
11.2.02	Perberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	1.287.463.000,00	1.306.842.000,00	19.379.000,00	1,51
11.2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	6.150.093.000,00	6.089.536.000,00	(60.557.000,00)	(0,98)

Magelang, 13 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG	<i>[Signature]</i>
4. KASUBAG	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. W. BIDAN	<i>[Signature]</i>
3. KEPYEMAS	<i>[Signature]</i>
4. I/A BID	<i>[Signature]</i>
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	<i>[Signature]</i>



**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						4		0
Golongan IV/d						7		4
Golongan IV/c		23				32		30
Golongan IV/b		3	36			469	1	72
Golongan IV/a		1	59	4		512	1	533
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>		<b>27</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>29</b>	<b>506</b>
Golongan III/d			11	246		170		338
Golongan III/c				83		213		407
Golongan III/b				7		166		378
Golongan III/a						769		263
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>175</b>	<b>169</b>
Golongan II/d						24		76
Golongan II/c						23		61
Golongan II/b								
Golongan II/a								
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>						<b>136</b>	<b>433</b>	<b>35</b>
Golongan I/d								46
Golongan I/c								2
Golongan I/b								0
Golongan I/a								
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>							<b>83</b>	<b>83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>106</b>	<b>340</b>		<b>1417</b>	<b>1030</b>	<b>2920</b>

PEJABAT PARAF  
1. SEKDA  
2. ASISTEN  
3. KABAG  
4. KASUBAG

Magelang, 13 Agustus 2019  
WALIKOTA MAGELANG  
SIGIT WIPYOMINDITO

PEJABAT PARAF  
1. SEKDA  
2. KP. BADAN  
3. SEKRETARIS  
4. KA. BID  
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID



**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM  
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019**





**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019





KOTA MAGELANG  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019






No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>JUMLAH</b>											

Magelang, 13 Agustus 2019

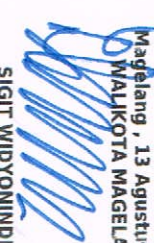
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO


PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

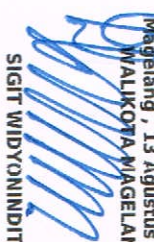
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	5	6
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Magelang , 13 Agustus 2019  
 WALIKOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYONINDITO


KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA						
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH /BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG			
		Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.04	Keluangan	120.000.000,00	134.408.800,00	(14.408.800,00)	12,01	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	14.408.800,00	12,01
4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	134.408.800,00	(14.408.800,00)	12,01	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	14.408.800,00	12,01
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)													0,00	0,00

Magelang, 13 Agustus 2019  
WALIKOTA MAGELANG  
  
SIGIT WIDYANMIDITO

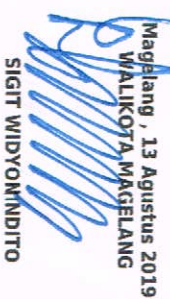
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH				DASAR HUKUM
		3	4	5	6	
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG Rp	%	7
<b>407.40701.19.009</b>	<b>Fasilitas kepekerjaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi</b>	<b>72.920.000,00</b>	<b>87.870.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>20,50</b>	
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	76.370.000,00	14.950.000,00	24,34	
<b>407.40701.19.014</b>	<b>Fasilitas pusat Inovasi Kota Magelang</b>	<b>71.536.000,00</b>	<b>74.441.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>4,06</b>	
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	58.091.000,00	2.905.000,00	5,26	
<b>407.40701.19.016</b>	<b>Fasilitas Kegiatan Seminar Nasional/Internasional</b>	<b>41.800.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>(1.900.000,00)</b>	<b>(4,55)</b>	
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.745.187.000,00)</b>	<b>(4.656.188.000,00)</b>	<b>88.999.000,00</b>	<b>(1,88)</b>	

Magelang, 13 Agustus 2019  
 WALKOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYANINDITO

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.07.4.07.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.18.001	Pembudayaan Hak Kekayaan Intelektual	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	12.300.000,00	37.911.000,00	0,00	50.211.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	121.050.000,00	438.538.000,00	0,00	559.588.000,00	120.150.000,00	459.538.000,00	0,00	579.688.000,00	20.100.000,00	3,59		
4.07.4.07.01.01.19.001	Forum Koordinasi Jejaring Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000,00	55.467.000,00	0,00	70.467.000,00	14.100.000,00	56.912.000,00	0,00	71.012.000,00	545.000,00	0,77		
4.07.4.07.01.01.19.003	Pembudayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	43.600.000,00	41.245.000,00	0,00	84.845.000,00	43.600.000,00	44.845.000,00	0,00	88.445.000,00	3.600.000,00	4,24		
4.07.4.07.01.01.19.005	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	34.600.000,00	183.420.000,00	0,00	218.020.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.19.009	Fasilitas Keperawatan dalam Anugrah Ipek dan Inovasi	11.500.000,00	61.420.000,00	0,00	72.920.000,00	11.500.000,00	76.370.000,00	0,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50		
4.07.4.07.01.01.19.014	Fasilitas pusat inovasi Kota Magelang	16.350.000,00	55.186.000,00	0,00	71.536.000,00	16.350.000,00	58.091.000,00	0,00	74.441.000,00	2.805.000,00	4,06		
4.07.4.07.01.01.19.016	Fasilitas Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)		

Magelang, 13 Agustus 2019  
 WAKIL KOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYANINDITO

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG) JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
07.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.422.168.000,00	1.404.168.000,00	(18.000.000,00)	(1,27)
<b>08</b>	<b>Partisipasi dan Budaya</b>	<b>8.944.593.000,00</b>	<b>8.873.718.000,00</b>	<b>(70.875.000,00)</b>	<b>(0,79)</b>
08.2.16	Kebudayaan	3.912.748.000,00	3.928.929.000,00	16.181.000,00	0,41
08.3.02	Partisipasi	5.031.845.000,00	4.944.789.000,00	(87.056.000,00)	(1,73)
<b>10</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>189.737.277.000,00</b>	<b>198.085.800.000,00</b>	<b>8.348.523.000,00</b>	<b>4,40</b>
10.1.01	Pendidikan	166.686.182.000,00	174.955.318.000,00	8.269.136.000,00	4,96
10.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	16.559.857.000,00	16.661.224.000,00	101.367.000,00	0,61
10.2.17	Perpustakaan	6.491.238.000,00	6.469.258.000,00	(21.980.000,00)	(0,34)
<b>11</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>14.069.915.000,00</b>	<b>14.148.337.000,00</b>	<b>78.422.000,00</b>	<b>0,56</b>
11.1.06	Sosial	6.632.359.000,00	6.751.959.000,00	119.600.000,00	1,80
11.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.287.463.000,00	1.306.842.000,00	19.379.000,00	1,51
11.2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	6.150.093.000,00	6.089.536.000,00	(60.557.000,00)	(0,98)

Magelang, 13 Agustus 2019  
WALIKOTA MAGELANG  
  
SIGIT WIDYONINDITO

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA Fungsional	STAF	
Golongan IV/e						4		0
Golongan IV/d						7		4
Golongan IV/c		23				32	1	30
Golongan IV/b		3	36	4		469		72
Golongan IV/a		1	59	4		512	1	533
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>		<b>27</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1</b>	<b>506</b>
Golongan III/d			11	246		220	29	338
Golongan III/c				83		170	85	407
Golongan III/b				7		213	187	378
Golongan III/a						166	212	
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>513</b>	<b>263</b>
Golongan II/d						88	175	169
Golongan II/c						24	145	76
Golongan II/b						23	53	61
Golongan II/a						1	60	
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>						<b>136</b>	<b>433</b>	<b>35</b>
Golongan I/d							35	46
Golongan I/c							46	2
Golongan I/b							2	0
Golongan I/a							83	
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>							<b>1030</b>	<b>83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>106</b>	<b>340</b>		<b>1417</b>	<b>1030</b>	<b>2920</b>

Magelang, 13 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG


  
SIGIT WIDYANINDITO



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA MAGELANG  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>											

Magelang, 13 Agustus 2019  
 WAKIL KOTA MAGELANG  
  
 SIGIT WIDYONINGDITO